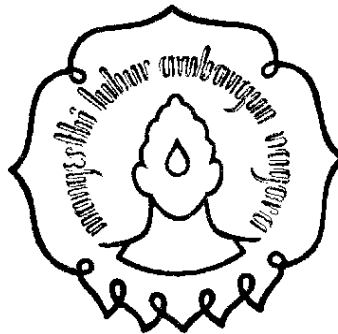


**ANALISIS KEWENANGAN PERATURAN PRESIDEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Rizal Abdurrahman
NIM. E 0013355**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2017**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KEWENANGAN PERATURAN PRESIDEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

Oleh:

Rizal Abdurrahman
E0013355

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 20 Desember 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Isharyanto, SH, MH
NIP. 19780501 2003121002



Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH, MH
NIP. 197006212006042001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS KEWENANGAN PERATURAN PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh

Rizal Abdurrahman

NIM. E0013355

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada Hari/ Tanggal : Senin/ 15 Januari 2018

DEWAN PENGUJI

1. Maria Madalina, S.H., M.H

NIP. 196010241986022001

Ketua

2. Dr. Isharyanto, S.H., M.H

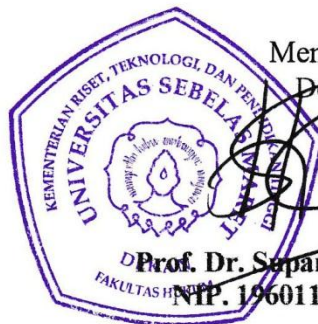
NIP. 19780501 2003121002

Sekretaris

3. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H:

NIP. 197006212006042001

Anggota



Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Sapanto, S.H., M.Hum

NIP. 196011071986011001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Rizal Abdurrahman

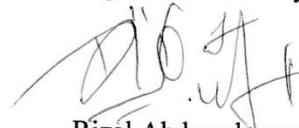
NIM : E0013355

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

**ANALISIS KEWENANGAN PERATURAN PRESIDEN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 20 Desember 2017

Yang Membuat Pernyataan,


Rizal Abdurrahman

NIM. E0013355

MOTTO

“Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam”
(QS. Al-an’am:162)

“Setinggi-tinggi Ilmu, Semurni-murni Tauhid, Sepintar-pintar siasat”
(HOS. Tjokroaminoto)

“Yakin Usaha Sampai”
(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda penulis, Drs. H. M. Aris Suparlan, M.Pd dan Dra. Hj. Hikmah Hariyani, serta Kakak Penulis Hari Kusuma Darmawan yang senantiasa memberi doa, kasih sayang dan semangat kepada penulis.
2. Kawan-kawan sehimpun-secita Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Surakarta Komisariat Fakultas Hukum UNS yang telah memberi penulis ladang berproses seluas-luasnya.
3. Kakak-kakak yang senantiasa mendidik, menuntun dan menginspirasi Penulis, Mas Didit Suryo, Mas Aldian Andrew, Mas Dayat, Mas Dipo Suryo, dan Mas Mail, serta kawan yang selalu bersama dan membersamai Kawan Annisa (Icha), Kawan Wahyu (Apem), Kawan Andi, Kawan Dwiky, Kawan Damara, Kawan Hida, Kawan Fahmi, Kawan Bimo, Kawan Shoyyin.
4. Seluruh teman dan sahabat penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

ABSTRAK

Rizal Abdurrahman. ANALISIS KEWENANGAN PERATURAN PRESIDEN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini menganalisis dan mengkaji mengenai latar belakang serta batasan diberikannya kewenangan kepada Presiden dalam membentuk Peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, dengan pendekatan kesejarahan, pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Presiden ada sebagai peraturan delegasi di Indonesia yang semakin dibutuhkan kehadirannya. Peraturan Presiden hanya dapat dibentuk dalam rangka (1) diperintahkan pembentukannya baik secara tegas (disebutkan bentuk dan lembaga) maupun tidak tegas (hanya disebutkan lembaga) oleh UU; (2) sebagai peraturan pelaksana atas Peraturan Pemerintah baik didelegasikan langsung atau menurut kebutuhan pengaturan lebih lanjut; dan (3) sebagai peraturan otonom/mandiri dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara. Bentuk Peraturan Presiden otonom/mandiri hanya dapat dibentuk bila (a) benar-benar bersifat teknis pemerintahan, dan (b) semata-mata untuk tujuan internal penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam rangka menalalkan ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah. Selain itu Peraturan Presiden juga dapat dibentuk sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Kata Kunci: Peraturan Presiden, Kewenangan Presiden , Batasan Peraturan Presiden

ABSTRACT

Rizal Abdurrahman. AN ANALYSIS OF AUTHORITY OF PRESIDENTIAL REGULATION IN THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This legal research analyzes and examines background and limitation of the Presidential power in the establishment of the Presidential Regulation according to constitution of 1945. This research is a normative research viewed from prescriptive characteristic by historic, statute and conceptual approach. The types of data collected include primary and secondary legal materials through library research. The data is analyzed by deductive method.

The results indicates that the Presidential Regulation important in order to filled delegation arrangement. Presidential Regulation can only be established within the framework of (1) enjoined the establishment of both expressly (mentioned forms and institutions) as well as unambiguous (only mentioned institutions) by the Act; (2) as the implementing regulation on the Government Regulation either delegated directly or according to the needs of further regulation; and (3) as an autonomous regulation in order to organize the power of state government. The form of autonomous presidential regulation can only be established if (a) is really a technical, and (b) solely for the internal purpose of administration in order to enforce the provisions of the laws and regulations. In addition, Presidential Regulations may also be established to the extent of providing public benefit and in accordance with the Good Governance Principles.

Keywords: Presidential Regulation, Presidential Power, Limitation of Presidential Regulation

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami berbagai hambatan, namun berkat bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka hambatan-hambatan tersebut dapat terselesaikan. Untuk segala bantuan, arahan, dan bimbingan, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Dr. Isharyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan pelajaran dan bimbingan dalam menyusun serta menyelesaikan proses pembuatan skripsi;
4. Suranto, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara;
5. Waluyo, S.H., M.Si, selaku Pembimbing Akademis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas seluruh ilmu pengetahuan yang telah diberikan, sebagai bekal yang akan digunakan di kehidupan yang akan datang;
7. Bapak dan Ibu serta Kakak tercinta, terima kasih atas dukungan, do'a, kesabaran, dan kasih sayang selama ini;
8. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UNS yang menjadi Kampus dan Keluarga kedua bagi Penulis selama menjalankan Studi S1;

9. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap bidang hukum, serta dapat berguna dan bermanfaat bagi keilmuan hukum.

Surakarta, 20 Desember 2017

Penulis

Rizal Abdurrahman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian.....	8
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teori.....	16
1. Tinjauan Tentang Kekuasaan Negara.....	16
a. Sumber-Sumber Kekuasaan	16
b. Teori-Teori Kekuasaan Tertinggi.....	17

c. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	21
d. Kekuasaan Eksekutif.....	25
2. Tinjauan Tentang Negara Hukum.....	28
3. Tinjauan Tentang Teori Hierarki Perundang-undangan.....	33
B. Kerangka Pemikiran.....	41
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kewenangan Presiden dalam Membentuk Peraturan Presiden	43
1. Rekam Historik Eksistensi Peraturan Presiden di Indonesia	43
a. Masa Awal Kemerdekaan dan Perubahan Praktik Sistem Pemerintahan.....	43
b. Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat.....	54
c. Masa Berlakunya UUDS dan Kembali Kepada Negara Kesatuan.....	59
d. Masa Kembali Kepada UUD 1945 dan Demokrasi Terpimpin.....	62
e. Masa Orde Baru.....	68
f. Masa Reformasi sampai Sekarang.....	72
2. Peraturan Presiden sebagai Peraturan Delegasi dan Otonom di Indonesia	78
B. Batasan Kewenangan Presiden Membentuk Peraturan Presiden ...	94
BAB IV. PENUTUP.....	104
A. Simpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	107